

**OPINI MAHASISWA TERHADAP PEMBERITAAN
KASUS KORUPSI e-KTP DI MEDIA TELEVISI
(STUDI DESKRIPTIF PADA MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Oleh:

TENGGU MUHAMMAD RIDZWAN FAUZAN

NPM 1403110198P

Program Studi Ilmu Komunikasi



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

OPINI MAHASISWA TERHADAP PEMBERITAAN KASUS KORUPSI e - KTP DI MEDIA TELEVISI (STUDI DESKRIPTIF PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA)

Oleh :

TENGGU MUHAMMAD RIDZWAN FAUZAN
1403110198P

Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi yang sangat merugikan keuangan negara Indonesia. Kasus korupsi e-KTP merupakan salah satu megakorupsi terbesar yang melibatkan banyak pejabat penting berstatus aktif serta pihak swasta dengan nilai uang korupsi sekitar 5,9 Trilyun Rupiah.

Tujuan penelitian bagaimana Opini Mahasiswa Terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi. Terdapat dua teori yang mendasari penelitian ini, yaitu teori opini publik dan teori spiral kebisuan (*spiral of silence*). Teori opini publik dipakai untuk menjelaskan bagaimana terbentuknya opini mahasiswa terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP. Sementara, Teori spiral kebisuan (*spiral of silence*) digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemberitaan di media televisi mempengaruhi pendapat serta pandangan para mahasiswa terhadap kasus korupsi e-KTP tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh berupa opini dari lima informan yang merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana Stambuk 2014. Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui reduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah setiap mahasiswa yang menjadi informan memiliki kesamaan pendapat serta pandangan terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP di Media Televisi. Dengan mengatakan bahwa kasus korupsi e-KTP adalah kasus yang sangat merugikan masyarakat karena seharusnya dana yang dikorupsi dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Sementara, mahasiswa menilai hukum yang tidak tegas adalah salah satu alasan mengapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia seperti yang teori yang diungkapkan oleh Marwan Mas. Selain itu, media memang cukup berperan besar dalam membentuk opini publik di kalangan mahasiswa, hal ini terlihat dari jawaban para mahasiswa dimana mereka menilai pembentukan pansus hak angket oleh DPR merupakan salah satu cara pelemahan KPK untuk mengusut kasus korupsi e-KTP ini secara tuntas.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Shubhanallah wa ta'ala atas segala rahmatNYA sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan syalawat tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa pula pada orang tua peneliti yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan opini mahasiswa terhadap pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi. Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini telah dilewati sebagai suatu tantangan yang harus dijalani, di samping sebagai pemenuhan kewajiban yang semestinya dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa doa, usaha, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ibunda Mariana Abdullah dan Ayahanda Tengku Inwan Rasyid atas perhatian dan kasih sayang selama ini yang tercurah tiada terkira hingga peneliti sukses mencapai titik ini. Terima kasih atas kerja keras dan doa kalian, peneliti persembahkan skripsi ini untuk kalian.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I. Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani S.Sos., M.I. Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Drs. Bahrum Jamil, M.AP, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Tenerman, S.Sos., M.I. Kom, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak-ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada peneliti selama berkuliah.
11. Bapak Hamdan, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara yang berbaik hati mengizinkan penulis melakukan penelitian di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

12. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum USU selaku informan yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan penulis demi selesainya skripsi ini.
13. Fahrozi (Oji), adik sekaligus sahabat peneliti, yang telah banyak berkorban untuk peneliti agar dapat menyelesaikan perkuliahan.
14. Indri, adik peneliti yang banyak membantu saat wawancara penelitian.
15. Teman-teman terbaik selama di Universitas; Nora, Andrial, Koto, Dendi, Indah, Dea, Devi, Lili, Debby, Mita, Hera, Imada, Ian, Pai, Ejak, Danu, Mursal, Dzul, Heri, Puri, Nindy, Fahmi, Vanni, Audina, Yolla, Agung, Khairi, Tengku, Fatiha, Reza Novlizal, serta teman-teman stambuk 2014 FISIP UMSU, sukses selalu.
16. Bambang Irawan (Bembeng), teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi yang bersama-sama mencari buku, bertemu dosen pembimbing, sekaligus editor penulisan skripsi ini.
17. Elida Hanum Daulay, teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi yang banyak memberi nasehat dan saran selama pengerjaan skripsi.
18. Teman-teman Red Sparkle Room Divisions Enhaii '07 yang selalu mendorong dan memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas terutama pihak-pihak terkait di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan kebijakan mengenai kepentingan orang banyak. Tidak ada maksud Peneliti menyinggung pihak manapun dalam penelitian ini. Peneliti memohon

maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih.

Medan, 14 Oktober 2017

Peneliti

Tengku Muhammad Ridzwan Fauzan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
A. Komunikasi	8
B. Komunikasi Massa	15
C. Televisi	21
D. Berita	22
E. Opini Publik	26
F. Teori Spiral Kebisuan / <i>Spiral of Silence Theory</i>	29
G. Korupsi	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Kerangka Konsep	40
C. Kategorisasi	40
D. Informan	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41

F. Teknik Analisis Data	42
G. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
H. Deskripsi Lokasi Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran I	(Foto Para Informan)
Lampiran II	(Daftar Riwayat Hidup)
Lampiran III	(SK-1)
Lampiran IV	(SK-2)
Lampiran V	(SK-3)
Lampiran VI	(SK-4)
Lampiran VII	(Surat permohonan perubahan judul)
Lampiran VIII	(Surat Pernyataan)
Lampiran IX	(Surat Riset)
Lampiran X	(SK-5)

DAFTAR TABEL

1. Tabel Kerangka Konsep	40
2. Tabel Kategorisasi	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

KTP atau Kartu Tanda Penduduk merupakan tanda pengenal bagi Warga Negara Indonesia. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 14 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, “Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

KTP selain berfungsi sebagai tanda pengenal juga berfungsi untuk keperluan administrasi lain diantaranya untuk pembukaan rekening bank, pengurusan izin dan sebagainya, serta terciptanya sebuah keakuratan dari data penduduk mendukung suatu program pembangunan.

Sejak bulan Februari tahun 2011, Kementrian Dalam Negeri secara resmi meluncurkan KTP jenis baru yang disebut e-KTP atau KTP Elektronik. e-KTP merupakan pembaharuan dari KTP jenis lama yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.

Dikutip dari *wikipedia*, melalui Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa: “Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk

dan berlaku seumur hidup untuk warga negara Indonesia dan untuk warga asing disesuaikan dengan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.”

Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pelaksanaan program e-KTP sendiri dibagi menjadi 2 tahap, diantaranya tahap pertama sejak tahun 2011 berakhir di tanggal 30 April 2012 mencakup sebanyak 67 juta penduduk. Sementara tahap kedua sendiri mencakup sebanyak 105 juta dari penduduk.

Karena besarnya jumlah penduduk Indonesia yang harus dibuatkan KTP-nya, maka program ini membutuhkan dana yang sangat besar. Proyek e-KTP ini sendiri menghabiskan anggaran negara tak kurang dari 5,9 Trilyun rupiah (*bbc.com*).

Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya program ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan kependudukan dan birokrasi berbelit-belit di Indonesia seperti pengurusan *passport* dan dokumen penting lainnya.

Namun, ternyata program yang sudah berlangsung sejak 2011 ini tak kunjung selesai hingga kini. Masih banyak masyarakat atau penduduk yang belum melakukan perekaman data kependudukan mereka. Minimnya sosialisasi ditambah luasnya wilayah Indonesia menyebabkan masyarakat tidak dapat informasi yang cukup mengenai pentingnya memiliki e-KTP ini.

Alasan klasik ketersediaan blangko yang seringkali habis juga menjadi salah satu permasalahan yang tak kunjung dapat ditemukan solusinya. Mendagri Tjahjo Kumolo beralasan masalah habisnya blangko atau e-KTP fisik, karena belum dimulainya proses pengadaan atau lelang blangko baru. Lelang baru akan dimulai bulan Maret 2017 ini dan menargetkan paling lambat bulan November-Desember sudah selesai (*detiknews.com*).

Ditengah permasalahan perekaman data kependudukan yang tak kunjung selesai ditambah blangko yang tak kunjung datang, publik atau masyarakat dihebohkan dengan sebuah kasus memalukan terkait e-KTP ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan adanya indikasi korupsi pada proyek pengadaan e-KTP ini sehingga program ini tidak kunjung selesai. Kasus ini tidak main-main, karena dikabarkan merugikan uang negara hingga mencapai 2,3 trilyun rupiah. Nama-nama besar pejabat negara pun turut disebut-sebut ikut menikmati uang haram ini.

Dikutip dari *kompas.com*, dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut ada 14 anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 yang mendapatkan jatah dari proyek itu dengan jumlah beragam.

Dari nama-nama pejabat yang disebut dalam sidang tersebut, ada dua nama yang cukup mengejutkan karena dikenal dekat oleh publik, yaitu Yassona Laoly yang kini menjabat Menkumham dan Ganjar Pranowo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, Ketua DPR saat ini, Setya

Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR diduga cukup punya peran dalam kasus korupsi ini (*detiknews.com*).

Kasus korupsi mega proyek e-KTP yang dinilai sistematis dan terstruktur ini sekaligus menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia yang sepertinya tak ada habisnya. Para politisi dinilai rentan tergoda uang haram hasil korupsi.

Generasi muda khususnya mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) perlu diberi peran lebih dalam mengatasi permasalahan korupsi ini. Karena mahasiswa sebenarnya tidak hanya berperan sebagai *agent of change* namun juga sebagai *agent of social control* (agen kontrol sosial). Ketika elemen masyarakat lain cenderung apatis terhadap persoalan korupsi ini, mahasiswa di sisi lain diharapkan mampu melakukan kritik-kritik sosial dengan lantang sebagai bentuk keprihatinan dari kondisi yang tak cenderung berubah.

Mahasiswa dapat menggunakan bidang keilmuan mereka masing-masing untuk melakukan perubahan. Seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi misalnya bisa bersuara menuangkan opini mereka di media-media tulisan seperti koran guna mengkritik kasus korupsi e-KTP ini. Atau seorang mahasiswa Psikologi bisa meneliti bagaimana pendidikan karakter sejak dini dapat mencegah korupsi. Hal-hal semacam ini walau dilakukan dalam skala kecil, namun sedikit demi sedikit akan terlihat dampaknya.

Untuk alasan itu pula, peneliti ingin meneliti bagaimana opini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tentang Kasus Korupsi e-KTP

sekaligus menguji perhatian, pengetahuan, dan pemahaman mereka terhadap kasus ini.

Peneliti memilih angkatan 2014 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai objek penelitian karena peneliti melihat generasi mereka adalah generasi yang akan segera menamatkan perkuliahan dan mungkin dihadapkan pada persoalan korupsi ini di masa depan. Karena itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, mereka dapat menyiapkan diri sebaik mungkin.

Sementara itu, kenapa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dipilih sebagai lokasi penelitian alasannya adalah karena merupakan salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia dan sekaligus representasi Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Opini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi e- KTP di Media Televisi?”

C. Pembatasan Masalah

Adapun maksud dibuatnya pembatasan masalah dalam penelitian ini, untuk memberikan ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar menjadi lebih fokus, jelas, dan spesifik. Maka dari itu, pembatasan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Objek penelitian ini dibatasi pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Angkatan 2014.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Opini Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

Untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam pemahaman mengenai salah satu bidang kajian komunikasi massa yaitu Opini Publik. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi yang memiliki minat dan ketertarikan yang sama terhadap Opini Publik.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu dalam mengambil beberapa kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan orang banyak.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini peneliti membuat suatu sistematika dengan membagi tulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Uraian Teoritis

Bab ini berisikan tentang teori Komunikasi, Komunikasi Massa, Televisi, Berita, Opini Publik, Teori Spiral Kebisuan (*Spiral of Silence Theory*), dan Korupsi.

BAB III: Metode Penelitian

Berisikan persiapan dan pelaksanaan Penelitian yang menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, dan Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V: Penutup

Berisikan uraian berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroiti (Nawawi, 1991 : 39). Pelaksanaan penelitian membutuhkan kerangka teori sebagai pedoman dasar berfikir dan berfungsi untuk mendukung analisa variabel - variabel yang diteliti. Menurut Nawawi (1991 : 40). Teori dalam penelitian yang paling luas, seperti konsep, penjelasan, dan ilmu-ilmu dari beberapa aspek pengalaman manusia (Littlejohn: 2009: 22). Teori yang dibangun oleh para ahli untuk menunjukkan apa yang dipandang penting dalam suatu proses keberlangsungan suatu fenomena ataupun realitas. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun kerangka teori sebagai landasan untuk menggambarkan dari segi mana peneliti menyoroit masalah yang telah dipilihnya.

A. Komunikasi

Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator (pemberi pesan) kepada komunikan (penerima pesan). Secara normal, pengertian sederhana ini didasari fakta bahwa dalam komunikasi hanya melibatkan dua orang saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, definisi ini perlahan-lahan mulai berubah menjadi lebih kompleks dikarenakan munculnya

ahli komunikasi dunia yang menambahkan unsur-unsur baru dalam definisi komunikasi mereka.

Beberapa definisi komunikasi yang cukup dikenal adalah ;

1. Menurut Everett M. Rodgers (Nurudin, 2010: 26)

Komunikasi adalah proses hal dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud mengubah perilaku.

2. Menurut Harold D. Laswell (Nurudin, 2010: 27)

Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa? (sumber), mengatakan apa? (pesan), dengan saluran apa? (media), kepada siapa? (penerima), dengan akibat atau hasil apa? (efek).

Definisi dari Laswell diatas merangkum dengan jelas unsur-unsur atau elemen komunikasi, yaitu sumber / pengirim pesan (*source / communicator*), pesan (*message*), media (*channel*), penerima pesan (*communicant*), dan efek (*effect*).

Sementara, Everett M. Rodgers menekankan bahwa dalam komunikasi ada sebuah gagasan, lambang, dan di dalam proses itu melibatkan orang lain. Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas seorang manusia, tentu masing-masing orang punya cara sendiri, tujuan apa yang akan didapatkan, melalui apa atau kepada siapa. Oleh karena itu, dalam komunikasi dikenal pola-pola tertentu sebagai manifestasi perilaku manusia dalam berkomunikasi.

Seiring perkembangan zaman, elemen atau unsur komunikasi yang dikemukakan Laswell dimodifikasi oleh ahli atau pakar komunikasi lain.

Contohnya Joseph Dominick (Morissan, 2013: 17) yang menyebut setidaknya ada delapan elemen atau unsur komunikasi. Delapan unsur komunikasi tersebut yaitu sumber, encoding, pesan, saluran, decoding, penerima, umpan balik, dan gangguan. Berikut penjelasan mengenai delapan unsur atau komunikasi itu.

a. Sumber.

Proses komunikasi selalu dimulai atau berasal dari sumber (*source*) atau pengirim pesan yaitu dimana gagasan, ide, atau pikiran berasal yang kemudian disampaikan kepada pihak lainnya yaitu penerima pesan. Sumber sering pula disebut komunikator. Sumber atau komunikator bisa jadi adalah individu, kelompok atau bahkan organisasi. Komunikator mungkin mengetahui atau tidak mengetahui pihak yang akan menerima pesannya.

Menurut Hovland (Morissan, 2013: 17), karakteristik sumber berperan dalam memengaruhi penerimaan awal pada pihak penerima pesan namun memiliki efek minimal jangka panjang. Hovland menyebut efek jangka panjang dari sumber sebagai efek tidur (*sleeper effect*). Dalam teori kredibilitas dan daya tarik sumber, sumber yang dipercaya (*credible*) akan dapat memperkuat nilai informasi yang disampaikan. Teori ini juga menegaskan sumber yang memiliki tiga hal, yaitu status, keandalan, dan keahlian sumber akan menambah bobot pesan sekaligus juga menambah bobot sumber dalam proses komunikasi (Morissan, 2013: 18).

b. Enkoding

Enkoding dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sumber untuk menerjemahkan pikiran dan ide-idenya ke dalam suatu bentuk yang dapat diterima oleh indera pihak penerima. Jika anda akan melakukan sesuatu, maka otak dan lidah anda akan bekerja sama untuk menyusun kata-kata dan membentuk kalimat. Ketika anda menulis surat, otak dan jari tangan akan bekerja sama untuk menghasilkan pola-pola atau bentuk yang terlihat di atas kertas.

Enkoding dalam proses komunikasi dapat berlangsung satu kali namun dapat terjadi berkali-kali. Dalam percakapan tatap muka, pembicara melakukan enkoding terhadap pikiran atau idenya dalam kata-kata. Kemampuan untuk melakukan enkoding ini berbeda-beda untuk setiap orang. Ada orang yang sangat mahir memilih kata-kata sehingga menghasilkan kalimat yang bagus dan mengesankan. Para orator ulung memiliki kemampuan enkoding yang sangat baik. Namun, lebih banyak lagi orang yang tidak memiliki kemampuan enkoding ini.

c. Pesan

Dominick (Morissan, 2013: 19) mendefinisikan pesan sebagai produk fisik aktual yang telah di-enkoding sumber. Harap dibedakan antara pesan dan enkoding karena keduanya tampak serupa. Enkoding adalah proses yang terjadi di otak untuk menghasilkan pesan, sedangkan pesan adalah hasil dari proses enkoding yang dapat dirasakan dan diterima oleh indera.

Pesan yang disampaikan manusia dapat berbentuk sederhana namun bisa memberikan pengaruh yang cukup efektif misalnya ucapan, "Tidak!". Pesan bisa

pula bersifat rumit seperti teori relativitas Einstein. Pesan dapat ditujukan kepada satu individu saja atau kepada jutaan individu. Pesan dapat dihasilkan dengan biaya yang murah bahkan gratis (misalnya kata-kata), namun pesan dapat pula dihasilkan dengan biaya yang cukup mahal (misalnya buku).

Penerima pesan memiliki kontrol yang berbeda-beda terhadap bentuk pesan yang diterimanya. Ada pesan yang mudah sekali diabaikan atau ditolak penerima, dalam hal ini penerima memiliki kontrol yang besar terhadap pesan yang diterimanya namun ada pula pesan yang sulit dikontrol atau dihentikan.

d. Saluran

Saluran atau channel adalah jalan yang dilalui pesan untuk sampai kepada penerima. Gelombang radio membawa kata-kata yang diucapkan penyiar di studio atau memuat pesan visual yang ditampilkan di layar kaca televisi. Aliran udara juga dapat berfungsi sebagai saluran. Orang buta menggunakan sentuhan ketika membaca huruf braille. Sentuhan juga merupakan saluran. Pesan terkadang membutuhkan lebih dari satu saluran untuk dapat mencapai penerimanya.

e. Dekoding

Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses dekoding yang merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses encoding. Dekoding adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau mengintrepetasikan pesan-pesan fisik ke dalam suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima. Ketika membaca koran kita melakukan dekoding terhadap pesan yang ada pada koran. Jika kita mendengar radio sambil membaca koran maka kita melakukan dua dekoding secara serentak,

satu audio dan satu visual. Baik manusia ataupun teknologi (misalnya radio dan televisi) merupakan dekoder yaitu elemen komunikasi yang melakukan dekoding.

Ada pesan yang tidak dapat di dekoding karena pihak yang melakukan enkoding (enkoder) meletakkan di saluran yang salah. Misalnya, panggilan telepon tidak akan pernah bisa di dekoding oleh seseorang yang tuli. Pesan melalui email tidak akan pernah bisa diterima oleh yang tidak memiliki komputer.

f. Penerima / Komunikan

Penerima atau *receiver* atau disebut juga audiensi adalah sasaran atau target dari pesan. Penerima dapat berupa individu, satu kelompok, lembaga atau bahkan suatu kumpulan besar manusia yang tidak saling mengenal. Siapa yang akan menerima pesan (penerima pesan) dapat ditentukan oleh sumber, misalnya komunikasi melalui telepon. Namun adakalanya penerima pesan tidak dapat ditentukan oleh sumber misalnya dalam program siaran televisi. Perlu diperjelas bahwa dalam situasi tertentu, sumber dan penerima pesan dapat langsung berhubungan namun dalam kesempatan lain sumber dan penerima pesan dipisah oleh ruang dan waktu.

g. Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik atau *feedback* adalah tanggapan atau respons dari penerima pesan yang membentuk dan mengubah pesan berikut yang akan disampaikan sumber. Umpan balik menjadi tempat perputaran arah dari arus komunikasi. Artinya sumber pertama kemudian menjadi penerima, sementara penerima menjadi sumber baru. Umpan balik berguna bagi sumber karena umpan balik memungkinkan sumber untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang

muncul. Umpan balik juga penting bagi penerima karena memungkinkan penerima berusaha untuk mengubah elemen-elemen dalam proses komunikasi.

h. Gangguan

Elemen terakhir dalam komunikasi adalah gangguan atau *noise*. Gangguan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengintervensi proses pengiriman pesan. Gangguan sangat kecil mungkin dapat diabaikan, namun terlalu banyak gangguan dapat menghambat pesan untuk mencapai tujuannya. Setidaknya ada tiga jenis gangguan yaitu: gangguan semantik, gangguan mekanik, dan gangguan lingkungan.

Gangguan semantik terjadi bilamana orang memiliki arti yang berbeda atas kata-kata atau ungkapan yang sama. Gangguan mekanik terjadi jika muncul masalah dengan alat yang digunakan untuk membantu terjadinya komunikasi. Contohnya pesawat televisi tidak dapat menerima gambar dengan jelas karena tiang antenanya patah. Pena tidak dapat digunakan karena kehabisan tinta. Internet tidak dapat digunakan karena modemnya tidak berfungsi.

Gangguan lingkungan terjadi jika sumber gangguan berasal dari luar elemen-elemen/unsur komunikasi yang disebutkan diatas. Gangguan ini biasanya diluar kontrol sumber atau penerima, misalnya orang yang bercakap-cakap di klub malam yang memutar musik keras-keras. Namun gangguan lingkungan juga dapat berasal dari sumber atau penerima pesan. Misalnya seseorang mencoba berbicara kepada seseorang yang memainkan instrumen musik atau berbicara kepada orang yang mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Semakin besar gangguan maka pesan yang diterima menjadi semakin tidak jelas. Umpan balik penting untuk

mengurangi efek gangguan. Semakin cepat umpan balik diterima semakin cepat pula gangguan teratasi.

Ditinjau dari pola yang dilakukan, ada beberapa jenis yang dapat dikemukakan. Para sarjana komunikasi atau mereka yang tertarik dengan ilmu komunikasi mempunyai pola (tipe) tersendiri dalam mengamati perilaku komunikasi. Namun semua itu tak perlu dibedakan secara kontradiktif, hanya berbeda penekanan disebabkan latar belakang dan lingkungan yang mendukungnya. Beberapa sarjana Amerika membagi pola komunikasi menjadi lima, yakni komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*), komunikasi massa (*mass communication*), dan komunikasi publik (*public communication*).

Joseph A. Devito (Nurudin, 2010: 28) membagi pola komunikasi menjadi empat, yakni komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik dan komunikasi massa. Penelitian kali ini masuk pada kajian komunikasi massa.

B. Komunikasi Massa

Menurut Bungin (2007: 71), Komunikasi Massa merupakan proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Komunikasi Massa diadopsi dari istilah bahasa Inggris yaitu *mass communication* yang artinya komunikasi menggunakan media massa atau komunikasi yang menggunakan "*mass mediated*".

Berdasarkan definisi diatas menurut Bungin (2007: 71), unsur-unsur penting dalam komunikasi massa adalah:

- a. Komunikator (pihak yang mengandalkan media massa, sumber pemberitaan)
- b. Media massa (media komunikasi dan informasi)
- c. Informasi (pesan) massa
- d. Gatekeeper (penyeleksi informasi)
- e. Umpan balik.

Karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Menurut McQuail (2011), proses komunikasi massa terlihat dalam bentuk:

1. Melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Jadi, proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi masyarakat dalam skala besar, sekali siaran, pemberitaan yang disebarkan dalam jumlah yang luas dan diterima oleh massa yang besar.
2. Proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Kalau terjadi interaktif di antara mereka, maka proses komunikasi (balik) yang disampaikan oleh komunikan ke komunikator sifatnya sangat terbatas, sehingga tetap saja di dominasi oleh komunikan.
3. Proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris diantara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi diantara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Kalau terjadi kondisi emosional

disebabkan karena pemberitaan yang sangat agiatatif, maka sifatnya sementara dan tidak berlangsung lama dan tidak permanen.

4. Proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal (non pribadi) dan tanpa nama. Proses ini menjamin, bahwa komunikasi massa akan sulit diidentifikasi siapa penggerak dan menjadi motor dalam sebuah gerakan massa di jalan.
5. Proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan hubungan-hubungan kebutuhan (*market*) di masyarakat. Seperti televisi dan radio melakukan penyiaran mereka karena adanya kebutuhan masyarakat tentang pemberitaan-pemberitaan massa yang ditunggu-ditunggu.

Nurudin (2007: 66-93) menyatakan ada beberapa fungsi komunikasi massa, yaitu:

- a. Informasi

Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi massa. Fakta-fakta yang dicari wartawan di lapangan kemudian dituangkannya dalam tulisan juga merupakan informasi. Fakta yang dimaksud adalah adanya kejadian yang benar-benar terjadi di masyarakat.

- b. Hiburan

Fungsi hiburan untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Masalahnya, masyarakat kita masih menjadikan televisi sebagai media hiburan. Hal ini mendudukan televisi sebagai alat utama hiburan (untuk melepas lelah). Oleh karena itu, jangan heran

jika jam-jam *prime time* (pukul 19.00 sampai 21.00) akan disajikan acara-acara hiburan, entah sinetron, kuis, atau acara jenaka lainnya.

c. Persuasi

Fungsi persuasif komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Persuasi bisa datang dari berbagai macam bentuk: Pertama, mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; Kedua, mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang; Ketiga, menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu; dan Keempat, memperkenalkan etika, atau menawarkan sistem nilai tertentu.

d. Transmisi Budaya

Transmisi budaya merupakan salah satu fungsi komunikasi massa yang paling luas, meskipun paling sedikit dibicarakan. Transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu.

e. Mendorong Kohesi Sosial

Kohesi yang dimaksud di sini adalah penyatuan. Artinya, media massa mendorong masyarakat untuk bersatu. Dengan kata lain, media massa merangsang masyarakat untuk memikirkan dirinya bahwa bercerai-berai bukan keadaan yang baik bagi kehidupan mereka. Media massa yang memberitakan arti pentingnya kerukunan hidup umat beragama, sama saja media massa itu mendorong kohesi sosial. Akan tetapi, ketika media massa mempunyai fungsi untuk menciptakan

integrasi sosial, sebenarnya di sisi lain media juga memiliki peluang untuk menciptakan disintegrasi sosial. Jadi, sebenarnya peluang untuk menciptakan integrasi dan disintegrasi sama besarnya.

f. Pengawasan

Komunikasi massa mempunyai fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni *warning or beware surveillance* atau pengawasan peringatan dan *instrumental surveillance* atau pengawasan instrumental. Fungsi peringatan dapat dilihat dari pemberitaan tentang munculnya bencana alam seperti badai, topan, gempa & tsunami dan sebagainya. Fungsi pengawasan peringatan juga meliputi informasi tentang adanya serangan militer yang dilakukan Negara lain. Sementara itu, fungsi pengawasan yang kedua yaitu pengawasan instrumental. Contohnya adalah informasi soal harga kebutuhan sehari-hari merupakan informasi penting yang sangat dibutuhkan masyarakat.

g. Korelasi

Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat.

h. Pewarisan Sosial

Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

i. Melawan Kekuasaan dan Kekuatan Represif

Hal yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komunikasi massa berperan memberikan informasi, tetapi informasi yang diungkapkannya ternyata mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan kemapanan. Memang diakui bahwa komunikasi massa juga bisa berperan untuk memperkuat kekuasaan, tetapi juga bisa sebaliknya.

Umumnya kita lebih tertarik bukan kepada apa yang kita lakukan kepada media, tetapi kepada apa yang dilakukan media kepada kita. Kita ingin tahu bukan untuk apa kita membaca surat kabar atau menonton televisi, tetapi bagaimana surat kabar dan televisi menambah pengetahuan, mengubah sikap, atau menggerakkan perilaku kita.

Menurut Jalaludin Rakhmat (2005: 111-115), kehadiran komunikasi massa memberi efek kepada khalayak diantaranya ;

1) Efek Kognitif

Efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi khalayak. Efek ini berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi.

2) Efek Afektif

Efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak. Efek ini berkaitan dengan emosi, sikap atau nilai.

3) Efek behavioral

Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku.

(Morissan, 2013: 21) menyebut bahwa para ahli komunikasi pada mulanya berpendapat bahwa komunikasi tatap muka (*face-to-face communication*) atau disebut juga dengan komunikasi interpersonal sebagai bentuk komunikasi yang memiliki efek pengaruh yang paling kuat jika dibandingkan dengan komunikasi massa karena komunikasi interpersonal terjadi secara langsung, melibatkan sejumlah kecil orang atau mungkin hanya dua orang yang sedang berbicara, serta adanya umpan balik yang bersifat segera. Adapun komunikasi massa tidak dapat dilakukan secara langsung atau bersifat satu arah (*linear*), melibatkan sejumlah besar orang serta umpan balik yang tidak bersifat segera. Namun perkembangan komunikasi massa menunjukkan bahwa pengaruh atau efek komunikasi massa saat ini sudah sangat sulit dibedakan dengan komunikasi interpersonal. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa umpan balik pada komunikasi massa bisa bersifat langsung dan segera. Kecepatan umpan balik yang diterima media penyiaran dari audiensinya, misalnya dalam program interaktif, memiliki kecepatan yang sama sebagaimana komunikasi tatap muka (*interpersonal*).

C. Televisi

Televisi merupakan salah satu media komunikasi yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia, karena televisi tersebar dan mampu mendukung mobilitas informasi yang sangat dibutuhkan manusia dan

televisi juga memiliki karakteristik psikologis yang khas. Hal ini, tampak dalam pengendalian arus informasi umpan balik, dan stimulasi sebagai indera dalam proposisi isi. Selain itu, televisi juga sebagai media elektronik yang audio visual yang artinya dapat merangsang pemirsa melalui pandangan dan penglihatan.

Effendi (2004:17) mengemukakan bahwa perkataan televisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “tele” yang berarti jauh dan “vision” yang berarti penglihatan. Jadi bila diartikan secara lengkap, televisi adalah media komunikasi jarak jauh dengan penyanggahan gambar dan pendengaran suara yang dilakukan dengan mekanisme gelombang elektromagnetik.

Televisi merupakan gelombang media dengar dan media gambar yang bersifat politis, informatif, hiburan dan pendidikan. Bahkan gabungan dari ketiga unsur tersebut. Televisi menciptakan suasana tertentu, yaitu pemirsanya dapat melihat dan menyelesaikannya, penyampaian seolah-olah langsung antara komunikator dengan komunikan. Informasi yang disampaikan oleh televisi akan mudah di mengerti karena mudah di dengar secara audio dan secara visual.

D. Berita

1. Definisi Berita

Berita dalam bahasa Inggris disebut news. Dalam *The Oxford Paperback Dictionary* terbitan *Oxford University Press* (dalam Umam, 2012: 241), berita diartikan sebagai “informasi tentang peristiwa terbaru”. *Merriam-webster’s Collegiate Dictonary* mengartikan *news* sebagai laporan peristiwa terkini (*report of recent event*) dan informasi yang tidak diketahui sebelumnya (*unknown*

information). Intinya, makna harfiah dari berita adalah informasi atau laporan peristiwa yang baru terjadi.

Ada pula yang berpendapat, berita adalah laporan peristiwa dari berbagai arah mata angin (berbagai penjuru dunia). Ini berdasar dari kepanjangan news (*North, East, West, South*). Kata “berita” berasal dari bahasa sansekerta, *vrit* (artinya ada atau terjadi) atau *vritta* (artinya kejadian atau peristiwa).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta (Umam, 2012: 241), “berita” adalah berarti kabar atau warta, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”.

Belum ada definisi yang diterima secara universal tentang berita. Menurut Earl English dan Clarence Hach (Umam, 2012: 241), berita sulit didefinisikan, sebab ia mencakup banyak variabel. Adapun, beberapa pakar komunikasi dan jurnalistik yang mencoba mendefinisikan berita, diantaranya yaitu:

1. Menurut Dean M. Lyle Spencer, berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.
2. Menurut William C. Bleyer, berita adalah sesuatu yang baru (terkini) untuk dimuat di surat kabar sehingga dapat menarik dan mempunyai makna dan menarik minat bagi pembaca.
3. Menurut William S. Maulsby, berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut.

4. Menurut Eric C. Hepwood, berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum (Umam, 2012: 242).

2. Jenis-Jenis Berita

Aris Sumadiria dalam buku *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature* (2014: 68-71) menyebut ada delapan jenis-jenis berita, yaitu:

1. *Straight News*, atau berita langsung adalah berita yang menyajikan peristiwa secara *to the point*, lugas, ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terkini, aktual dan menarik. Biasanya jenis berita ini memiliki unsur-unsur 5W + 1H (*what, who, where, why, dan how*).

2. *Depth News*, atau berita mendalam adalah berita yang dikembangkan secara mendalam terhadap sesuatu peristiwa yang tak terlalu nampak di permukaan. Unsur-unsur pada berita ini adalah “Mengapa” atau *why* dan “bagaimana” atau *how* (bagaimana peristiwa itu terjadi dan detail peristiwa) serta *so what* (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya).

3. *Comprehensive News*, atau berita menyeluruh adalah berita yang bersifat menyeluruh ditinjau dari segala aspek. Berita menyeluruh, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung (*straight news*). Sebagai gambaran, berita langsung bersifat sepotong-sepotong, tidak utuh, hanya merupakan serpihan fakta setiap hari. Berita langsung seperti tidak peduli dengan hubungan atau keterikatan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Berita menyeluruh mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benang merahnya terlihat jelas.

4. *Intrepretative News*, merupakan jenis berita yang merupakan perkembangan dari straight news. Perkembangan disini maksudnya adalah penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber dan pengamat, serta menambah data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail, dan lebih lengkap. Intrepretative ini sangat membutuhkan wawasan yang luas dan juga ketajaman analisis dari sang wartawan.

5. *Opinion News*, merupakan berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini ini biasanya berasal atau bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa.

6. *Feature News*. Pada *feature news*, wartawan atau reporter mencari fakta yang menarik perhatian pembacanya. Penulis feature news, menyajikan suatu pengalaman pembaca (*reading experiences*) yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

7. *Investigative News*. Berita jenis ini biasanya memusatkan perhatian terhadap sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, pada berita investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta tersembunyi pada sebuah kasus. Pelaksanaanya sering ilegal dan tidak etis.

8. *Editorial Writting* adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Para penulis editorial bukan bekerja untuk dirinya sendiri melainkan untuk surat kabar, majalah, ataupun stasiun radio. Seperti halnya

petugas informasi, penulis editorial mungkin akan diberi instruksi sebelum menulis.

E. Opini Publik

1. Pengertian Opini Publik

Noelle-Neumann (Morissan, 2013: 526) menyatakan bahwa opini adalah derajat persetujuan atau derajat kesepakatan dari suatu masyarakat tertentu. Sementara menurut Santoso Sastropetro (Helena Olli, 2007: 33), Opini adalah suatu pernyataan tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda.

Opini adalah respon yang diberikan seseorang yaitu komunikasi kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa pertanyaan. Bila kita membahas opini seringkali kita juga mengaitkannya dengan opini publik. Opini dan Opini Publik adalah dua hal yang berbeda. Yang dimaksud opini adalah pendapat seseorang atau opini individu. Selama opini merupakan opini seseorang (*individual opinion*), tidak akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan akan timbul apabila opini itu menjadi opini publik, menyangkut orang banyak karena menyangkut kepentingan orang banyak (Effendy, 2002: 12).

Anwar Arifin (2011: 113) menjelaskan bahwa opini publik adalah pendapat yang sama dan dinyatakan oleh banyak orang yang diperoleh melalui diskusi yang intensif sebagai jawaban atas pertanyaan dan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum. Permasalahan itu tersebar luas di media massa. Pendapat rata-rata individu-individu itu memberi pengaruh terhadap orang banyak

dalam waktu tertentu. Pengaruh itu dapat bersifat positif, netral, atau bahkan negatif.

Helena Ollie (2007: 20) menyebut istilah opini publik dapat dipergunakan untuk menandakan setiap pengumpulan pendapat yang dikemukakan individu-individu. Sedangkan, Santoso Sastroputero (Ollie, 2007: 20) menyebut istilah opini publik sering digunakan untuk menunjuk kepada pendapat-pendapat kolektif dari sejumlah besar orang.

Selanjutnya Bernard Berelson (Anwar Arifin, 2011: 193 – 194) mengaitkan Opini Publik dengan politik dan sosial. Ia berpendapat bahwa tanggapan orang-orang terhadap masalah politik dan sosial yang mengandung pertentangan dan meminta perhatian umum, seperti hubungan internasional, kebijakan pemerintah dalam urusan dalam negeri, pemilihan umum, dan hubungan antar etnis. Whyte (Anwar Arifin, 2011: 194) menyebut bahwa Opini Publik adalah sikap rakyat mengenai suatu masalah menyangkut kepentingan umum. Hal ini tak jauh berbeda dengan pandangan Doob (Anwar Arifin, 2011: 194) yang menyebut Opini Publik itu menunjukkan sikap orang-orang dari suatu golongan sosial terhadap suatu masalah.

Dari berbagai definisi diatas, Anwar Arifin (2011: 194 - 195) akhirnya menyimpulkan Opini Publik sebagai berikut:

1. Opini Publik adalah pendapat, sikap perasaan, ramalan, pendirian dan harapan rata-rata individu kelompok dalam masyarakat, tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan-persoalan sosial.

2. Opini Publik adalah hasil interaksi, diskusi atau penilaian sosial antar individu tersebut yang berdasarkan pertukaran pikiran yang sadar dan rasional yang dinyatakan baik lisan maupun tulisan.

3. Isu atau masalah yang di diskusikan itu adalah hasil dari apa yang dioper oleh media massa baik media cetak maupun elektronik.

4. Opini Publik hanya dapat berkembang pada negara – negara yang menganut paham demokrasi. Dalam negara tersebut akan memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyatakan pendapat dan sikapnya baik lisan maupun tulisan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Anwar Arifin (2011: 195) menyebut Opini Publik paling tidak memiliki tiga unsur. Pertama, harus ada isu (berupa peristiwa atau kata – kata) yang aktual, penting dan menyangkut kepentingan umum, yang disiarkan melalui media massa. Kedua, harus ada sejumlah orang yang mendiskusikan isu tersebut, yang kemudian menghasilkan kata sepakat mengenai sikap, pendapat dan pandangan mereka. Ketiga, selanjutnya pendapat mereka itu diekspresikan atau dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan gerak-gerik.

2. Pengukuran Opini Publik

Berdasarkan perspektif atau paradigma mekanistik, Opini Publik yang berkaitan dengan politik atau kekuasaan dapat disebut sebagai efek dari suatu proses komunikasi politik, terutama yang disalurkan melalui media massa.

Opini publik yang sehat hanya dapat tumbuh di dalam masyarakat yang mempunyai kebebasan berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers. Harus ada minat yang cukup besar dari rakyat terhadap soal-soal pemerintahan dan kenegaraan, dan adanya pendidikan politik yang cukup tinggi

bagi rakyat, serta adanya kesediaan masyarakat atau rakyat dalam mengutamakan kehendak atau kepentingan bersama.

Di negara-negara demokrasi, Opini Publik telah diukur perkembangannya melalui berbagai cara, seperti peninjauan (polling), pengumpulan suara (pendapat) masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Secara lisan yaitu mengundang lembaga-lembaga tertentu yang dapat dianggap mewakili Opini Publik untuk menyatakan aspirasi dan pendapatnya terhadap suatu hal yang menyangkut kepentingan umum. Secara tertulis yaitu dengan melalui surat atau mengisi angket yang diedarkan oleh lembaga/perusahaan yang ingin mengetahui pendapat publik tentang suatu kebijakan.

Demikian juga Opini Publik dapat diukur dengan cara melakukan wawancara yang bersifat umum atau terbuka, baik pada masyarakat pada umumnya maupun *opinion leader* (pemimpin pendapat). Cara ini sering dilakukan oleh lembaga pers untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum.

F. Teori Spiral Kebisuan / *Spiral of Silence Theory*

Salah satu topik dalam ilmu komunikasi massa yang banyak menarik perhatian adalah meninjau hubungan antara pendapat atau opini masyarakat dengan isi pesan media.

Spiral kebisuan merupakan gejala atau fenomena yang melibatkan saluran komunikasi interpersonal dan komunikasi melalui media. Media berfungsi menyebarkan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan (Morissan, 2013: 530).

Teori spiral kebisan yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann mencoba menunjukkan bagaimana komunikasi interpersonal dan pesan yang disampaikan media bekerja secara bersama mengembangkan opini publik.

Dalam hal menjelaskan mengapa media memberikan pengaruh terhadap opini publik, Neumann menjelaskan bahwa media tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Media massa memiliki tiga sifat atau karakteristik yang berperan dalam membentuk opini publik, yaitu ubikuitas, kumulatif dan konsonan (Morissan, 2013: 531).

Sifat ubikuitas mengacu pada fakta bahwa media merupakan sumber informasi yang sangat luas karena terdapat dimana saja. Karena media terdapat dimana saja, maka media menjadi instrumen yang sangat penting, diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Media berusaha mendapat dukungan dari publik terhadap pandangan atau pendapat yang disampaikannya, dan selama itu pula pandangan atau pendapat itu terdapat dimana-mana.

Sifat kumulatif media mengacu pada proses media yang selalu mengulang-ulang apa yang disampaikannya. Pengulangan terjadi di sepanjang program, baik pada satu media tertentu ataupun pada media lainnya, baik yang sejenis maupun tidak. Neumann (Morissan, 2013: 531) menyebut hal ini sebagai *"reciprocal influence in building up frame of reference"* (pengaruh timbal balik dalam membangun kerangka acuan).

Sifat konsonan mengacu pada kesamaan kepercayaan, sikap dan nilai-nilai yang dianut media massa. Neumann menyatakan bahwa konsonan dihasilkan

berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri, dan menjadikan pemikiran dan pendapat tersebut seolah-olah berasal dari masyarakat (Morissan, 2013: 531).

Ketiga karakteristik media tersebut memberikan pengaruh besar terhadap opini publik. Media massa memberikan kontribusi terhadap munculnya spiral kebisuan karena media melakukan kemampuan untuk menentukan dan menyebarluaskan pandangan-pandangan yang dinilai lebih dapat diterima publik secara umum.

Spiral kebisuan terjadi ketika orang mengemukakan pandangannya karena merasa pandangannya mewakili pandangan yang populer, sedangkan mereka yang merasa opininya tidak mewakili pandangan populer memilih untuk diam.

Teori spiral kebisuan mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik merupakan pandangan minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pandangannya, sedangkan mereka yang meyakini bahwa pandangannya mewakili mayoritas cenderung untuk mengemukakannya pada orang lain. Neumann menyatakan bahwa media lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas, dan menekan pandangan minoritas. Proses ini terjadi dalam pola atau bentuk menyerupai spiral sedemikian rupa sehingga satu pendapat akan berakhir dengan publisitas dan popularitas tinggi, sedangkan pendapat lainnya akan berakhir dengan publisitas dan popularitas rendah.

Mereka yang memiliki pandangan minoritas biasanya cenderung untuk berhati-hati dalam berbicara atau bahkan diam saja. Hal ini memperkuat pandangan publik bahwa pendapat mereka lemah.

Kajian Neumann menitikberatkan peran opini dalam interaksi sosial. Sebagaimana kita ketahui opini publik sebagai isu kontroversial akan berkembang pesat saat dikemukakan melalui media massa. Ini berarti opini publik orang-orang juga dibentuk, disusun, dan dikurangi oleh peran media massa. Jadi, ada kaitan erat antara opini dengan media massa. Opini yang berkembang dalam kelompok mayoritas dan kecenderungan seseorang untuk diam karena dia berasal dari kelompok minoritas juga bisa dipengaruhi oleh isu-isu media massa (Nurudin, 2010: 182).

Dengan demikian, opini publik mengacu pada perasaan bersama dari suatu populasi atas suatu masalah tertentu. Sering kali, media menentukan masalah apa yang penting atau menarik bagi masyarakat, dan sering kali menciptakan kontroversi terhadap suatu topik.

Teori spiral kebuisan memberikan argumentasi bahwa orang selalu bertindak sebagai penilai iklim opini publik. Orang mengetahui pendapat atau pandangan mana yang populer lebih banyak diterima dan pandangan mana yang tidak banyak diterima orang. Dengan kata lain, orang tidak akan merasa segan untuk melakukan perkiraan berdasarkan perasaannya mengenai adanya opini publik terhadap suatu pendapat tertentu serta membuat perkiraan mengenai besar kecilnya jumlah orang-orang yang mendukung atau menolak suatu pendapat. Morissan (2013: 529) menyebut ini dengan istilah “kuasi statistik” (*quasistatistical*

sense), yaitu adanya perasaan yang cukup meyakinkan dalam diri seseorang bahwa suatu pendapat atau pandangan tertentu adalah yang paling banyak mendapat dukungan atau diterima walaupun hal tersebut belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Selain itu, orang juga memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap arah pembicaraan seseorang apakah mendukung atau menolak suatu pendapat. Singkatnya, orang memiliki kemampuan untuk memperkirakan kekuatan argumentasi pihak lawan.

Neumann percaya bahwa orang tidak suka mendiskusikan topik-topik yang tidak memiliki dukungan mayoritas. Teori ini juga menunjukkan sifat orang yang tidak berdebat atau menghindari perdebatan.

G. Korupsi

Ruslan Renggong dalam buku *Hukum Tindak Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP* menjabarkan secara gamblang tentang definisi korupsi, apa saja perbuatan yang termasuk kategori korupsi, dan jenis-jenis korupsi.

1. Definisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah kemudian turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Prancis: *corruptio*, dan Belanda: *corruption* (*korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi”. Di Malaysia dipakai kata resuah yang diambil dari bahasa Arab *risywah* (suap) yang secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim

atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum, perbuatan ini termasuk dosa.

Subekti dan Tjiptosoedibio (dalam Renggong, 2016: 60) menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut Sayed Husein Alatas (Renggong, 2016: 61), korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat

sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apapun untuk mencapai efisiensi (dalam Renggong, 2016: 61).

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi menurut Jeremy Pope yaitu:

- a. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak keluarga;
- b. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- c. Uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan);
- d. Berbagai ragam penggelapan.

2. Perbuatan Yang Dikategorikan Korupsi

Dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu:

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat

itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

- b. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik atau swasta atau internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

3. Jenis-Jenis Korupsi Secara Sosiologis

Menurut Renggong (2016: 62), secara sosiologis ada tiga jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi karena kebutuhan. Bagi karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja.
- b. Korupsi untuk memperkaya diri. Biasanya dilakukan oleh pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan mark up terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.
- c. Korupsi karena peluang. Pejabat atau sebagian anggota masyarakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena penyelenggara negara khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis, manajemen yang amburadul dan pejabat atau petugas yang tidak bermoral.

4. Penyebab Terjadinya Korupsi di Indonesia

Marwan Mas (Renggong, 2016: 63) menyebutkan secara umum perilaku korupsi di Indonesia terjadi akibat hal-hal berikut:

- a. Sistem yang keliru. Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. Gaji yang rendah. Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.
- c. *Law enforcement* tidak berjalan. Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.
- d. Hukuman yang ringan. Memang UU Korupsi mengancam penjatuhan pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain.
- e. Tidak ada keteladanan pemimpin. Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tetapi tidak

adanya teladan yang baik dari pemimpin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.

- f. Masyarakat yang apatis. Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Noor (2011: 34-35) Penelitian deskriptif adalah penulisan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang jadi sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian kualitatif Menurut Kriyantono (2014: 196) dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu.

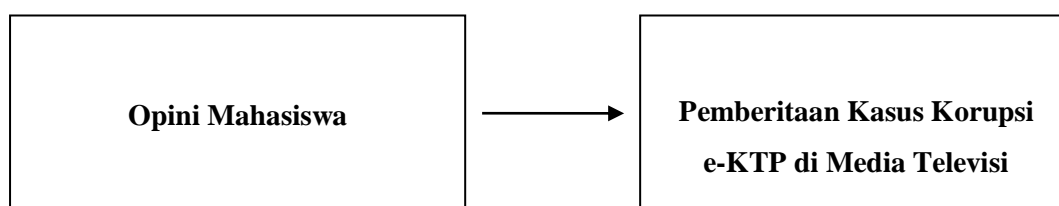
Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata atau pun gambar-gambar dari angka.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan dalam momentum perspektif penelitian. Adapun kerangka konsep dalam Penulisan ini Penulis menggambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar

Kerangka Konsep



C. Kategorisasi

Tabel Kategorisasi

Konsep Teoritis	Konsep Operasional
Opini Mahasiswa terhadap Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi	A. Komponen Kognitif <ol style="list-style-type: none"> 1. Perhatian 2. Pengetahuan 3. Pemahaman B. Komponen Afektif <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Suka 2. Sikap Setuju 3. Sikap Puas C. Komponen Behavioral <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung 2. Tidak Mendukung

D. Informan / Narasumber

Adapun definisi untuk menentukan narasumber adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan informan / narasumber dalam data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.
- 2) Informan / narasumber dipilih secara purposive (*purposive sampling*) berdasarkan aktivitas mereka dan kesediaan mereka untuk mengeksplorasi pengetahuan mereka. Peneliti dan memilih informan atau bisa juga informan yang mengajukan secara sukarela.

Adapun yang menjadi informan / narasumber dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana Angkatan 2014.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara seperti yang ditegaskan oleh (Moleong, 2013: 190) adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) itu.

Menurut Moleong (2013: 190) persiapan wawancara tak terstruktur dapat dilaksanakan menurut tahapan-tahapan tertentu, yakni sebagai berikut:

- Tahap pertama, ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai. Barangkali suatu saat pilihan hanya berkisar diantara beberapa orang menemui persyaratan.
- Tahap kedua, ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan responden. Karena responden adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya.
- Tahap ketiga, adalah mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara.

2. Dokumentasi

Menurut Gunawan (2013: 178) dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

F. Teknis Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014: 244) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2014: 247-252) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data Penelitian kualitatif, yaitu:

- Reduksi Data (*Data Reduction*)
- Paparan data (*Data Display*)
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

G. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai selesai. Lokasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jalan Universitas No. 4, Kampus USU, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

H. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Singkat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Dikutip dari situs *fh.usu.c.id*, Yayasan Universitas Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 Juni 1952 oleh :

Abdul Hakim (Gubernur Propinsi Sumatera Utara)

Dr. Mansoer

Dr. Soemarsono (Inspektur Kesehatan Rakyat Propinsi Sumatera Utara)

Pada bulan Januari 1954 Yayasan Universitas Sumatera Utara mendirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yang diresmikan pada tanggal 12 Januari 1954. Selanjutnya pada tanggal 1 September 1955 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat serta Fakultas Kedokteran diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Beberapa tokoh yang berperan dalam hal ini adalah:

Prof. Mr. T. Dzulkarnain

Prof. Mr. Mahadi

Prof. Mr. Ani Abbas Manoppo

Prof. Mr. Mahammad Yusuf

Mr. Tagor Ginagan Harahap

T. Jafizham, S.H.

Para tokoh tersebut kemudian disertakan dalam proses pembentukan Universitas Negeri di Medan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan RI No. 34175/S tanggal 29 Maret 1957. Pada hari Rabu tanggal 20 November 1957 DR. Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia meresmikan berdirinya Universitas Sumatera Utara.

Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2003 pada tanggal 11 November 2003, USU ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT. BHMN) dan Fakultas Hukum merupakan salah satu unit pelaksana akademik dari PT. BHMN USU. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0325/U/1994 tanggal 9 Desember 1994 dan Surat Keputusan Rektor USU No. 1637/PT05.H/SK/I/95 dinyatakan bahwa Fakultas Hukum hanya mengelola satu program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum.

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara memiliki enam departemen yaitu, Departemen Hukum Perdata, Departemen Hukum Pidana, Departemen Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Administrasi Negara, Departemen Hukum Internasional dan Departemen Hukum Ekonomi.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Periode
2016-2021;

D e k a n : Prof. Dr. Budiman Ginting, SH. M.Hum.

Wakil Dekan I : Dr. Saidin, SH. M.Hum.

Wakil Dekan II : Puspa Melati Hasibuan, SH. M.Hum

Wakil Dekan III : Dr. Jelly Leviza SH. M.Hum

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Daftar Para Informan

Informan I

Nama : Jonathan Hasibuan

NIM : 140200291

Informan II

Nama : Imanuel Sembiring

NIM : 140200044

Informan III

Nama : M. Ardian Harahap

NIM : 140200112

Informan IV

Nama : Andre Pasaribu

NIM : 140200392

Informan V

Nama : Kristian Hutasoit

NIM : 140200318

a. Perhatian

Penulis : Apakah anda mengikuti pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi?

Informan I : Ya saya cukup mengikuti.

Informan II : Ya.

Informan III : Ya saya mengikuti.

Informan IV : Ya saya mengikuti.

Informan V : Ya saya mengikuti.

Penulis : Di Media Televisi apa biasanya anda menonton pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP?

Informan I : Di media televisi Metro TV.

Informan II : Di media televisi Metro TV, TV One dan SCTV.

Informan III : Saya melihat berita kasus korupsi e-KTP ini dari dua sumber, yaitu TV One dan Metro TV.

Informan IV : Di TV One.

Informan V : Di Metro TV dan TV One.

b. Pengetahuan

Penulis : Apakah yang anda ketahui tentang Kasus Korupsi e-KTP? Jelaskan menurut pengetahuan anda!

Informan I : Setahu saya itu adalah salah satu megakorupsi yang terbesar dan melibatkan beberapa tokoh terkemuka di Indonesia dan jumlah nilai yang di korupsi besar jumlahnya.

- Informan II : Yang saya ketahui cukup banyak mulai dari penetapan tersangka Setya Novanto dan beberapa anggota dewan lainnya sampai terbentuk Pansus Hak Angket KPK.
- Informan III : Yang saya tahu pada kasus korupsi e-KTP ini sudah di dapat tersangkanya dimana salah satu diantaranya adalah Setya Novanto yang saat ini tengah menumpuh Pra Peradilan.
- Informan IV : Saya mengetahui bahwa Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka pada kasus ini dan sedang menempuh pra peradilan, dan Menkumham Yasonna Laoly juga diduga terlibat.
- Informan V : Yang saya ketahui adalah Ketua DPR Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selain itu, saya melihat akibat Kasus Korupsi e-KTP ini berdampak pada proses pembuatan e-KTP di masyarakat.
- Penulis** : Apakah anda mengetahui besarnya kerugian negara akibat Kasus Korupsi e-KTP ini? Jelaskan menurut pengetahuan anda!
- Informan I : Ya saya tahu dan seperti yang saya bilang sebelumnya jumlah nilai yang dikorupsi sangat besar. Seingat saya 1,2 Trilyun lebih.
- Informan II : Saya kurang tahu.
- Informan III : Sekitar Triyunan lebih.

Informan IV : Sekitar 2 Trilyun lebih. Saya kurang tahu jumlah pastinya.

Informan V : Sekitar Trilyunan lebih. Jumlah pastinya saya lupa.

c. Pemahaman

Penulis : Menurut pemahaman anda sebagai Mahasiswa Hukum Pidana, Mengapa Kasus Korupsi e-KTP ini dapat terjadi?

Informan I : Karena kerakusan pejabat-pejabat terkait yang merasa kekayaan yang dimilikinya saat ini masih kurang jadi mereka ingin menambah kekayaannya. Karena sifat serakahnya.

Informan II : Kalau saya lihat sebagai Mahasiswa Hukum Pidana, yang pertama kasus ini terjadi mungkin karena lemahnya sistem pengawasan, yang kedua etika dan moral para pejabat tersebut yang kurang baik karena kalau yang saya lihat para pejabat-pejabat tersebut sebenarnya sudah kaya dan gaji mereka cukup besar tapi karena etika dan moral mereka tidak baik masih tergoda melakukan korupsi, yang ketiga dan yang paling penting adalah kesempatan atau peluang.

Informan III : Pertama kasus korupsi ini terjadi karena adanya permainan politik melalui pengadaan-pengadaan serta tender dengan pihak swasta. Pengadaan-pengadaan inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya korupsi.

Informan IV : Menurut saya ini terjadi karena kerakusan serta gaya hidup para wakil rakyat atau anggota DPR. Mereka memakai uang

hasil korupsi untuk memenuhi tuntutan hidup mereka yang bermewah-mewahan.

Informan V : Menurut saya ada beberapa faktor penyebab korupsi e-KTP ini. Dari segi ekonomi saya menilai para pejabat yang melakukan korupsi ini tergiur dengan besarnya nominal jumlah anggaran yang tersedia pada pengadaan e-KTP ini. Dari segi sosiologis, mungkin para pejabat ini minder pada rekannya sesama pejabat sehingga memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan korupsi supaya dapat memenuhi gaya hidup mereka.

Penulis : Melihat besarnya kerugian negara pada Kasus Korupsi e-KTP ini, Apakah menurut anda Kasus Korupsi e-KTP ini terjadi secara sistematis atau terencana? Berikan alasannya!

Informan I : Ya terjadi secara sistematis. Karena kasus ini melibatkan banyak tokoh-tokoh dan pejabat-pejabat terkait, pasti itu sudah direncanakan secara matang dan melibatkan pihak ketiga (swasta) juga sebagai pemenang tender.

Informan II : Sebenarnya kasus ini terjadi secara sistematis. Tapi walaupun begitu, seperti yang saya bilang tadi, sesuatu yang sistematis sekalipun tidak akan terjadi jika tidak ada peluang. Ada celah yang bisa dimanfaatkan para koruptor ini akibat pengawasan yang kurang. Buktinya kasus ini

terjadi secara sistematis adalah banyaknya pihak yang terlibat.

Informan III : Pertama tentu karena adanya peluang, nah setelah adanya peluang, barulah korupsi ini dikerjakan secara sistematis. Buktinya adalah Ketua DPR RI sendiri ikut tersangkut kasus ini. Itu membuktikan ada sistem yang salah sehingga dari pimpinan sampai bawahan ikut terlibat.

Informan IV : Menurut saya karena kurangnya pengawasan dari lembaga penegak hukum.

Informan V : Menurut saya ini terjadi secara sistematis. Karena kasus ini tidak hanya melibatkan satu pihak saja.

d. Sikap Suka

Penulis : Bagaimana anda melihat pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi? Apakah anda menyukainya? Berikan alasannya!

Informan I : Sebenarnya pada awalnya saya menyukai dan mengikuti perkembangan pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini namun lama kelamaan pemberitaan kasus korupsi e-KTP hilang sehingga saya hanya mengikuti perkembangan kasus ini melalui media sosial seperti Line.

Informan II : Sebenarnya awal-awal kasus korupsi e-KTP ini saya menyukai pemberitaan kasus korupsi e-KTP tapi setelah

terbentuknya pansus hak angket KPK oleh DPR saya jadi kurang menyukai. Menurut saya ada permainan oleh DPR pada pansus hak angket tersebut.

Informan III : Ya saya menyukainya. Karena menurut saya kasus ini menarik untuk dibuka ke publik, mengingat banyaknya pejabat-pejabat yang terlibat. Dan lagi, menurut saya ketika dana e-KTP ini dikorupsi pasti sangat berdampak pada pembuatan e-KTP di masyarakat.

Informan IV : Ya saya menyukai pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP ini.

Informan V : Saya menyukai pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini karena ini berhubungan dengan bidang yang sedang saya pelajari sekarang ini yaitu Hukum Pidana.

c. Sikap Setuju

Penulis : Bagaimana anda melihat kinerja KPK pada penanganan Kasus Korupsi e-KTP ini?

Informan I : Saya melihat dari hari ke hari masyarakat pada umumnya percaya pada KPK disertai OTT yang dilakukan menunjukkan keseriusan KPK menyelesaikan kasus ini.

Informan II : Menurut saya kinerja KPK sudah bagus karena mereka berani mengungkap kasus ini dan patut di apresiasi. Karena tidak sedikit anggota dewan yang terlibat dan mereka berani mengungkapnya.

- Informan III : Saya sangat mengapresiasi kinerja KPK pada penanganan Kasus Korupsi e-KTP ini, terutama setelah Setya Novanto menjadi tersangka. Meskipun, saya juga melihat adanya intervensi politik pada penanganan Kasus Korupsi e-KTP ini. Adanya intervensi politik ini menurut saya menimbulkan polemik baru bagi penegakan hukum di Indonesia.
- Informan IV : Menurut saya sejauh ini sudah cukup baik. Meski masih ada kekurangan disana sini.
- Informan V : Saya mengacungi dua jempol untuk KPK pada penanganan kasus korupsi e-KTP ini, karena mereka cepat dan tangkas dalam menangani kasus korupsi e-KTP ini. Karena dana yang di korupsi yang cukup besar sebenarnya bisa dialihkan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti pendidikan, dan pangan untuk masyarakat miskin.
- Penulis** : Hukuman apa yang menurut anda pantas diberikan untuk para pelaku Kasus Korupsi e-KTP ini?
- Informan I : Penjara selama mungkin disertai dengan pemiskinan. Mungkin penjara sekitar puluhan tahun.
- Informan II : Menurut saya hukuman yang pantas adalah Pemiskinan. Semua harta benda dirampas negara dan pejabat yang korupsi dipecat dari jabatannya saat ini.

- Informan III : Hukuman yang pantas menurut saya adalah hukuman maksimal. Dalam UU Korupsi hukuman maksimal adalah penjatuhan hukuman mati dan penjara seumur hidup. Hukuman mati adalah yang paling pas menurut saya karena akan menimbulkan efek jera.
- Informan IV : Menurut saya hukuman seumur hidup dan kerugian negara dikembalikan. Tidak perlu sampai pemiskinan.
- Informan V : Menurut saya pribadi, hukuman mati adalah yang paling pantas untuk pelaku Kasus Korupsi e-KTP ini.

f. Sikap Puas

- Penulis** : Apakah anda cukup puas terhadap pemberitaan kasus korupsi e- KTP di Media Televisi?
- Informan I : Saya merasa kurang puas terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini.
- Informan II : Saya merasa sudah cukup puas pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini di Media Televisi dan cukup jelas bagi saya.
- Informan III : Saya kurang puas. Karena pemberitaan di media berbeda-beda. Ada media yang pro kinerja KPK dan ada media yang kontra terhadap kinerja KPK. Dan hal itu membingungkan masyarakat. Saya menuntut adanya independensi media terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini.

Informan IV : Kurang puas. Karena kurang lengkap dan kurang rinci informasi yang saya peroleh. Hanya garis besar kasusnya saja, tidak sampai detail.

Informan V : Saya tidak puas, karena media memberitakan informasi-informasi yang berulang-ulang. Tidak diberitakan kelanjutan kasus tersebut. Tidak dikupas secara mendalam duduk permasalahan kasus korupsi e-KTP ini.

g. Mendukung

Penulis : Apakah anda mendukung penegakan Kasus Korupsi e-KTP dan berbagai Kasus Korupsi lainnya diusut secara tuntas tanpa pandang bulu ? Beri alasan anda!

Informan I : Ya saya mendukung. Karena menurut saya korupsi di Indonesia ini sudah terjadi secara sistemik. Semua level masyarakat melakukan korupsi. Sehingga keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum seperti perbaikan fasilitas malah dipakai untuk kepentingan pribadi para koruptor.

Informan II : Jelas saya mendukung. Alasannya karena negara kita ini sudah miskin jadi jangan lagi ditambah dengan kasus-kasus yang menyebabkan kerugian negara. Karena dana yang di korupsi pejabat-pejabat tersebut seharusnya bisa digunakan

untuk hal-hal lain seperti sarana kesehatan dan perbaikan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

Informan III : Ya saya mendukung. Karena saya yakin, apabila KPK benar-benar objektif dalam membuka kasus ini, setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka pasti banyak pejabat-pejabat lainnya yang juga akan ikut ditetapkan sebagai tersangka.

Informan IV : Ya jelas saya mendukung. Kasus ini harus diusut secara tuntas.

Informan V : Ya jelas saya mendukung. Karena menurut saya akibat adanya Kasus Korupsi e-KTP ini, proses pembuatan e-KTP di masyarakat menjadi terganggu.

h. Tidak Mendukung

Penulis : Sikap apa yang tidak anda dukung terkait Kasus Korupsi e-KTP ini?

Informan I : Sikap yang tidak saya dukung terkait Kasus Korupsi e-KTP ini adalah misalnya sikap pejabat yang terlibat dimana salah satunya Setya Novanto yang ketika dipanggil KPK selalu beralasan sakit.

Informan II : Sikap yang saya tidak dukung terkait kasus korupsi e-KTP ini adalah dibentuknya pansus hak angket KPK oleh DPR. Memang benar pansus hak angket itu adalah hak DPR tapi

hal tersebut menurut saya akan melemahkan KPK dalam penegakan kasus korupsi e-KTP ini.

Informan III : Sikap yang saya tidak dukung adalah adanya intervensi politik pada penegakan hukum Kasus Korupsi e-KTP oleh penguasa. Contohnya adalah dibentuknya Pansus Hak Angket KPK.

Informan IV : Saya tidak mendukung sikap DPR yang membentuk Pansus Hak Angket KPK pada kasus korupsi e-KTP ini. Karena menurut pengetahuan saya, Pansus Hak Angket itu seharusnya ditujukan kepada lembaga eksekutif bukan lembaga yudikatif / penegak hukum seperti KPK. Dengan dibentuknya Pansus Hak Angket KPK ini saya menduga ada upaya dari anggota DPR untuk memangkas kewenangan KPK pada Kasus Korupsi e-KTP ini.

Informan V : Sikap yang saya tidak dukung pada penanganan Kasus Korupsi e-KTP ini adalah pembentukan Pansus Hak Angket oleh DPR. Menurut saya, adanya Pansus Hak Angket ini sengaja dibentuk seolah-olah untuk melindungi Ketua DPR, Setya Novanto yang telah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.

B. Pembahasan

Pada sub bab ini, peneliti akan membahas satu persatu pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, sehingga terlihat bagaimana sesungguhnya opini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada Kasus Korupsi e-KTP ini.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Apakah anda mengikuti pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP?”, hasilnya adalah keseluruhan informan menjawab mengikuti pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di media televisi. Pada pertanyaan berikutnya, peneliti bertanya, “Di Media Televisi apa biasanya anda menonton pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP?”. Hasil yang diperoleh adalah tiga informan menjawab dua stasiun televisi yakni Metro TV dan TV One. Sementara satu informan menjawab hanya TV One, dan satu tersisa menjawab hanya Metro TV. Artinya pada pertanyaan ini, mahasiswa lebih memilih stasiun televisi khusus berita sebagai sumber informasi mereka.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Apakah yang anda ketahui tentang Kasus Korupsi e-KTP?”, empat informan sepakat menjawab bahwa mereka mengetahui satu nama telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi e-KTP ini yaitu Setya Novanto. Sementara, seorang informan mengaku mengetahui kasus korupsi e-KTP ini sebagai sebuah kasus megakorupsi yang melibatkan banyak pejabat

penting tanpa menyebut secara spesifik nama pejabat yang dimaksud. Kemudian, peneliti bertanya, “Apakah anda mengetahui besarnya kerugian negara akibat kasus kasus korupsi e-KTP ini?”, dan jawaban para informan adalah mereka tidak tahu pasti besarnya jumlah yang dikorupsi. Dengan demikian, opini yang dapat peneliti simpulkan dari kedua pertanyaan ini adalah mahasiswa mengenal dengan baik nama pejabat yang terlibat karena merupakan seorang ketua lembaga penting di Indonesia, meski para mahasiswa ini tidak tahu berapa besar kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi e-KTP ini.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Menurut pemahaman anda sebagai mahasiswa hukum pidana, Mengapa kasus korupsi e-KTP ini dapat terjadi?”, tiga informan menjawab karena pejabat-pejabat yang terlibat korupsi tersebut ingin memperkaya diri dan didorong oleh sifat serakah, sementara satu informan menjawab kasus korupsi e-KTP ini terjadi karena adanya peluang melalui pengadaan-pengadaan serta tender kerjasama dengan pihak swasta. Satu informan terakhir menjawab karena kurangnya etika dan moral para pejabat tersebut. Pada pertanyaan berikutnya, “Melihat besarnya kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP ini, Apakah menurut anda kasus korupsi e-KTP ini terjadi secara sistematis atau terencana?”, keempat informan sepakat menjawab kasus ini benar terjadi secara sistematis dan terencana. Alasan mereka adalah karena banyaknya pejabat yang terlibat ditambah pihak swasta juga ikut terseret kasus korupsi e-KTP ini. Sementara satu informan lain menjawab bahwa hal ini terjadi tidak secara

sistematis namun karena kurangnya pengawasan dari lembaga penegak hukum. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa menurut pemahaman para informan sebagai mahasiswa hukum pidana mereka berpendapat bahwa kasus korupsi e-KTP ini terjadi akibat sifat serakah dari pejabat-pejabat yang terlibat sehingga menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri dengan melakukan korupsi secara sistematis bersama pihak swasta.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Bagaimana anda melihat pemberitaan kasus korupsi e-KTP di Media Televisi? Apakah anda menyukainya?”, tiga mahasiswa yang menjadi informan menjawab mereka menyukai pemberitaan kasus korupsi e-KTP, sedangkan dua informan menjawab menyukai pada awal-awal pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini namun kemudian tidak menyukai karena pemberitaan yang hilang dari media televisi untuk beberapa saat. Dengan melihat pendapat yang dominan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa para informan menyukai pemberitaan kasus korupsi e-KTP di media televisi.

5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Hukuman apa yang menurut anda pantas diberikan kepada para pelaku kasus korupsi e-KTP ini?”, jawaban yang diberikan informan sangat beragam. Tidak ada pendapat yang dominan. Dua informan menjawab hukuman yang pantas adalah pemiskinan, dua informan menjawab hukuman mati, sementara satu informan lain menjawab hukuman penjara seumur hidup. Pada

pertanyaan berikutnya, “Bagaimana anda melihat kinerja KPK pada penanganan kasus korupsi e-KTP ini?”, jawaban yang diperoleh adalah seluruh informan mengapresiasi kinerja KPK pada penanganan kasus korupsi e-KTP ini. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa tidak ada pendapat dominan mengenai hukuman yang pantas untuk para pelaku kasus korupsi e-KTP ini, namun seluruh informan pada dasarnya sangat menghargai, dan mendukung kinerja KPK dalam menangani kasus korupsi e-KTP.

6. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Apakah anda cukup puas terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP di Media Televisi?”, empat informan berpendapat tidak puas sementara seorang lain mengatakan puas. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa para informan merasa tidak puas terhadap pemberitaan kasus korupsi e-KTP di Media Televisi.

7. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Apakah anda mendukung kasus korupsi e-KTP dan berbagai kasus lainnya diusut secara tuntas tanpa pandang bulu?”, hasilnya seluruh informan mendukung pengusutan kasus korupsi e-KTP ini dan kasus-kasus lainnya sampai tuntas. Alasan mereka mendukung adalah karena menurut mereka uang negara yang dikorupsi jika dikembalikan seharusnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa seluruh informan memiliki

kesamaan pendapat soal pengusutan kasus korupsi e-KTP ini yang harus diusut secara tuntas.

8. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan lima (5) informan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, ditemukan bahwa pada pertanyaan, “Sikap apa yang anda tidak dukung terkait kasus korupsi e-KTP ini?”, jawaban yang peneliti peroleh adalah empat informan tidak mendukung sikap DPR membentuk Pansus Hak Angket karena dinilai dapat melemahkan kewenangan KPK, sementara satu informan menjawab tidak mendukung sikap salah satu tersangka yaitu Setya Novanto yang beralasan sakit ketika akan dipanggil untuk diperiksa KPK.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa para informan berpendapat bahwa sikap DPR yang membentuk Pansus Hak Angket adalah sikap yang tidak baik dan akan melemahkan KPK dalam menangani kasus korupsi e-KTP ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, hasil wawancara yang diperoleh dari 5 (lima) informan Opini Mahasiswa Terhadap Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, maka kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kasus Korupsi e-KTP merupakan sebuah kasus yang menyedot perhatian banyak pihak dikarenakan banyaknya pejabat dan tokoh-tokoh yang diduga terlibat ditambah besarnya jumlah anggaran negara yang dikorupsi. Kasus Korupsi e-KTP ini terjadi karena keserakahan dan sifat ingin memperkaya diri oleh pejabat dan pihak swasta, dimana ada prinsip “mempertahankan jarak” yang dilanggar sehingga korupsi ini dapat terjadi.
2. Salah satu penyebab korupsi ini dapat terjadi adalah hukuman yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, dimana sebenarnya pada UU Korupsi Nomor 31 Pasal 2 Ayat 2 ancaman pidana hukuman mati dapat diterapkan, namun tetap harus memiliki syarat-syarat tertentu.
3. Pemberitaan Kasus Korupsi e-KTP di Media Televisi ini dianggap kurang memuaskan, dikarenakan informan menilai media televisi menyajikan berita Kasus Korupsi e-KTP tidak mendetail dari mulai awal terjadinya kasus. Selain itu, seorang informan menilai pemberitaan kasus korupsi e-KTP ini memihak kepada salah satu pihak sehingga membingungkan masyarakat.

4. Mencegah penelitian ini tidak meluas maka peneliti membatasi masalah pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana Stambuk 2014. Penelitian ini terdapat penjelasan mengenai Komunikasi, Komunikasi Massa, Televisi, Berita, Opini Publik, Teori Spiral Kebisuan (*Spiral of Silence Theory*), dan Korupsi. Penelitian ini tidak hanya fokus kepada Kasus Korupsi e-KTP saja tetapi juga fokus kepada opini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara merupakan salah satu representasi Sumatera Utara dalam hal pendidikan hukum, sehingga membuat peneliti tertarik menjadikan tempat ini sebagai lokasi penelitian.
6. Para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sudah cukup memahami permasalahan Kasus Korupsi e-KTP ini secara umum dan jawaban-jawaban yang disampaikan memiliki kesamaan pendapat.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami lebih jauh melalui penelitian serta mewawancarai informan, akhirnya peneliti sampai pada bagian saran yang mudah-mudahan berguna baik bagi peneliti pribadi maupun para pembuat kebijakan di Indonesia ini. Saran tersebut yaitu:

1. UU Korupsi belum sepenuhnya ampuh untuk memberi efek jera bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Buktinya pada kasus korupsi e-KTP ini banyak sekali pejabat dan pihak swasta yang terlibat. Jika ingin memberantas korupsi secara menyeluruh di Indonesia, sebaiknya pihak-pihak terkait terutama lembaga penegak hukum seperti KPK, dan Kepolisian menerapkan hukuman maksimal sesuai amanat undang-undang diantaranya hukuman mati atau pidana seumur hidup.
2. Sebaiknya para pejabat publik dan pembuat kebijakan di Indonesia mematuhi prinsip “mempertahankan jarak” seperti yang diungkapkan oleh Jeremy Pope diatas agar peluang untuk terjadinya korupsi dikemudian hari dapat ditekan.
3. Masyarakat seharusnya tidak lagi apatis terhadap perilaku koruptif para pejabat. Jika ditemukan pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi, sebaiknya dilaporkan pada pihak-pihak terkait dan berwenang agar korupsi di Indonesia dapat berkurang secara signifikan. Hal ini sesuai amanat PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi.

4. Media massa khususnya media televisi sebagai sumber informasi masyarakat, ketika memberitakan kasus korupsi e-KTP ini sebaiknya dapat menyajikan informasi atau berita secara berimbang tanpa memihak salah satu pihak.
5. Mahasiswa Hukum Pidana Fakultas Hukum Sumatera Utara sudah cukup paham tentang materi korupsi yang ditanyakan oleh peneliti. Artinya pembelajaran yang mereka terima di bangku perkuliahan cukup menunjang pemahaman mereka tentang tindak pidana korupsi secara keseluruhan. Peneliti berharap ilmu hukum yang diperoleh para mahasiswa ini dapat dipakai kelak di masa depan demi penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011, *Komunikasi Politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi, dan Komunikasi Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2007, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, PT. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2009, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, PT Bumi Angkasa, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2014, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Littlejohn, Stephen W dan Karen A. Foss. 2009, *Teori Komunikasi; Theories of Human Communication* (edisi 9 terjemahan bahasa Indonesia oleh Muhammad Yusuf Hamdan), Penerbit Salemba Humanika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Morissan, 2013, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Nawawi, H, Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurudin, 2007, *Sistem Komunikasi Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pengantar Komunikasi Massa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mc. Quail, Denis. 2011, *Teori Komunikasi Massa*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Olii, Helena. 2007, *Opini Publik*, Penerbit PT. Indeks, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Renggong, Ruslan. 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar* KUHP, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Rakhmat, Jalaludin. 2005, *Psikologi Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung.

Umam, Khaerul, dan Kadar Nurjaman, 2012, *Komunikasi & Public Relation: Panduan Praktis Mahasiswa, Birokrat, Praktisi Bisnis*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung.

Sumber Lain :

Phyrman. "Komunikator dan Opini Publik." Kuliah Komunikasi. 2008. 01 Juni 2017. <<http://kuliahkommunikasi.blogspot.co.id/2008/11/komunikator-politik-opini-publik.html>>

Murni, Putri. "Khalayak dan Komunikasi Politik." Putrimurni/cirebontrust.com. 2016 01 Juni 2017. <<https://putrimurni.wordpress.com/2016/05/21/a-khalayak-komunikasikan-komunikasi-politik/>>

Basri, Seta. "Pengertian Komunikasi Politik dan Komponen-komponen Komunikasi Politik." Seta Basri Menulis Terus. 2009. 01 Juni 2017. <<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/komunikasi-politik.html>>

"DEFINISI KOMUNIKASI POLITIK (A-IK-5)." Tugas Komunikasi UB. 2011. 01 Juni 2017. <http://tugaskomunikasiub.blogspot.co.id/2011/11/tugas-komunikasi-politik-kelas-pol-3_04.html>

"Undang-Undang No. 23 Tahun 2006". Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota. 01 Juni 2017. <<http://disdukcapil.limapuluhkotakab.go.id/>>

"Tujuh hal yang perlu Anda ketahui terkait 'megakorupsi' e-KTP." bbc.com. 05 Juni 2017. <<http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39218275>>

"Fungsi dan Kegunaan e-KTP." Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. 05 Juni 2017. <<http://dinpendukcapil.purbalinggakab.go.id/fungsi-dan-kegunaan-e-ktip/>>

"Kartu Tanda Penduduk Elektronik." Wikipedia Indonesia. 05 Juni 2017. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik>

- “Target 172 Juta Pencetakan e-KTP Tak Pernah Tercapai.” Kumparan.com. 2017. 05 Juni 2017. <<https://kumparan.com/indra-subagja/target-172-juta-pencetakan-e-ktp-tak-pernah-tercapai>>
- “Batas Perekaman e-KTP Diperpanjang sampai Pertengahan 2017.” Detiknews.com. 2017. 05 Juni 2017. <<https://news.detik.com/berita/d-3311863/mendagri-batas-perekaman-e-ktp-diperpanjang-sampai-pertengahan-2017>>
- “51 Anggota Komisi II DPR 2009-2014 Dapat Kucuran Dana Proyek E-KTP.” Kompas.com. 2017. 05 Juni 2017. <<http://regional.kompas.com/read/2017/03/09/14362681/51.anggota.komisii.ii.dpr.2009-2014.dapat.kucuran.dana.proyek.e-ktp>>
- “Diungkap Jaksa, Begini Peran Novanto di Korupsi e-KTP.” Detiknews.com. 05 Juni 2017. <<https://news.detik.com/berita/d-3442198/diungkap-jaksa-begini-peran-novanto-di-korupsi-e-ktp>>
- “Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.” 05 Juni 2017. <<http://fh.usu.ac.id/>>